

**TESIS**

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI  
TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK  
(CYBER NOTARY)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**Diajukan Oleh:**

**RAFIQA ZAHRA FARHAN**

**2220122032**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Judul : KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM  
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN  
SECARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)  
Nama : RAFIQA ZAHRA FARHAN  
NIM : 2220122032

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Akhir Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Agustus 2024



**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I  
  
**Dr. Azmi Fendri, S.H., MKn**  
NIP. 197505102005011003

Pembimbing II  
  
**Dr. Yussy A. Mannas, S.H., M.H.**  
NIP. 198402182008012002

**Menyetujui  
Komisi Penguji**

Penguji  
  
**Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd**  
NIP. 196402221990021001

Penguji  
  
**Dr. Delfivanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197502162001122001

Penguji  
  
**Alexander, S.H., M.Kn.**

Dekan Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Andalas  
  
**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
  
**Dr. Yussy A. Mannas, S.H., M.H.**  
NIP. 198402182008012002

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI  
TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK  
(CYBER NOTARY)**

**ABSTRAK**

**(Rafiqa Zahra Farhan, 2220122032, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2024)**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat terasa disetiap aspek kehidupan, hampir segala profesi telah tersentuh dan memanfaatkan era globalisasi secara maksimal, tidak terkecuali profesi notaris. Peran notaris dituntut untuk dapat turut serta karena didalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya peran notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti peran notaris dalam transaksi konvensional biasanya. Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik membutuhkan pelayanan jasa yang cepat, tepat waktu dan efisien, hal tersebut kemudian disebut dengan istilah *Cyber Notary*. Konsep mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) bagi notaris tercantum pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tentang kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang kepada notaris di Indonesia. Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan berbagai penafsiran dari kata mensertifikasi, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum. Pada praktik di lapangan juga secara nyata, dikarenakan ketidakjelasan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya secara konkrit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri mengakibatkan notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum apabila kemudian penerapannya menimbulkan permasalahan. Atas uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terkait urgensi serta kepastian hukum dari kewenangan notaris mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian yakni urgensi kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia yaitu pemanfaatan kemajuan teknologi di semua profesi termasuk profesi Notaris. Sebagaimana setiap penyelenggaraan transaksi elektronik yang menggunakan sistem elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik. Sertifikasi Transaksi Secara Elektronik yang termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai bagian atau pihak ketiga dari pada lembaga sertifikasi yang mempunyai tugas sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang melakukan pengecekan data dan identitas persyaratan pengajuan sertifikat elektronik dari pemohon, serta nanti pada akhirnya penyelenggara sertifikasi elektronik yang akan mengeluarkan sertifikat elektronik berisi tanda tangan serta identitas lainnya yang telah diajukan sebelumnya oleh notaris.

**Kata Kunci : Notaris, Kewenangan, Sertifikasi Transaksi, Cyber Notary**

**JURIDICAL STUDY OF NOTARY AUTHORITY TO CERTIFY TRANSACTIONS  
CARRIED OUT ELECTRONICALLY  
(CYBER NOTARY)**

**ABSTRACT**

**(Rafiq Zahra Farhan, 2220122032, Thesis, Master of Notary, Faculty  
Andalas University Law, 83 pages, 2024)**

*Very rapid technological developments can be felt in every aspect of life, almost all professions have been touched and are taking maximum advantage of the era of globalization, including the notary profession. The role of the notary is required to be able to participate because in an electronic transaction it is very possible for the role of the notary as a trusted third party, similar to the role of the notary in conventional transactions. The development of the function and role of notaries in electronic transactions requires fast, timely and efficient services, this is then referred to by the term Cyber Notary. The concept of certifying transactions carried out electronically (cyber notary) for notaries is listed in the explanation of Article 15 paragraph (3) UUJN regarding other authorities granted by law to notaries in Indonesia. The word certify in the Explanation to Article 15 paragraph (3) UUJN gives rise to various interpretations of the word certify, so that in this case there is a blurring of legal norms. In practice in the field, it is also evident that due to the lack of clarity regarding further technical regulations regarding concrete implementation in the Law on the Position of Notaries itself, this results in notaries not having a legal basis or umbrella if its implementation then causes problems. Based on this description, the author conducted research regarding the urgency and legal certainty of a notary's authority to certify transactions electronically (cyber notary). The research method used is normative juridical, with a statutory approach (statute approach), the type and source of data used is secondary data, with qualitative analysis. The results of the research are the urgency of notary authority in certifying transactions carried out electronically (cyber notary) in Indonesia, namely the use of technological advances in all professions including the Notary profession. As with every electronic transaction that uses an electronic system, it is mandatory to have an electronic certificate. Electronic Transaction Certification, which is contained in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) UUJN, has the aim of providing legal certainty that there is new authority for Notaries to act as part or third parties rather than certification bodies whose duties are as registration authorities (registration authority) who checks the data and identity requirements for submitting an electronic certificate from the applicant, and ultimately the electronic certification organizer will issue an electronic certificate containing the signature and other identification that has been previously submitted by the notary.*

**Keywords :Notary, Authority, Transaction Certification, Cyber Notary**